

Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Utama Keberhasilan Kebijakan Pemerintah dalam Membentuk Karakter Anak

Us'an Us'an^{1*}, Jenjang Waldiono², Sriyono Sriyono³

^{1,2,3} Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

^{1*}usanazim75@gmail.com, ²jwaldiono@gmail.com, ³sriyono@unimus.ac.id

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam pendidikan nasional yang tujuannya membentuk manusia seutuhnya, beriman, berakhlak mulia, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial. Namun, berbagai fenomena penyimpangan perilaku anak menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah sebagai faktor utama keberhasilan dalam pembentukan karakter anak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam membentuk karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat berperan penting melalui keteladanan, pembiasaan nilai-nilai moral, penerapan norma sosial, serta keterlibatan program pendidikan berbasis komunitas. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana melalui kebijakan pendidikan, kurikulum, dan penciptaan iklim sosial yang kondusif. Sinergi antara partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan karakter anak. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dioptimalkan guna membentuk generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan berkarakter di tengah tantangan global.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Pembentukan Karakter Anak.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter sangat dibutuhkan saat ini, sebab pendidikan karakter yang selama ini disosialisasikan belum tercapai dengan maksimal. Maraknya perilaku negatif, seperti tawuran, pergaulan bebas, pencurian, serta penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa penyimpangan masih banyak melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini mutlak diperlukan terutama untuk anak-anak. Itu sebabnya pembinaan atau pendidikan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai karakter tidak bisa terpisahkan dari peran penting orang tua, sebab bisa dikatakan karakter ini juga yang menentukan kualitas seseorang (Us'an Us'an, Katni Katni, Ustadi Hamzah, 2026). Pembentukan karakter merupakan tujuan utama pendidikan. Indikator tercapainya proses Pendidikan yang berorientasi pada karakter di antaranya seseorang menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab dirinya kepada Tuhan, memahami dan menunaikan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju ke arah kesempurnaan sebagai manusia yang beradab. Dengan demikian, bisa dikatakan ketiadaan karakter berarti ketidakberhasilan dalam proses pendidikannya.

Dalam proses pembentukan karakter tersebut, tentunya dibutuhkan peran para *stakeholders* yaitu para pemangku pendidikan baik orang tua, guru, masyarakat atau pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Sidi Gazalba bahwa setidaknya ada tiga yang berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan yaitu: (a) keluarga, (b) sekolah, dan (c) kesatuan sosial (masyarakat). Orang tua sebagai pendidik primer hendaknya mengembangkan seluruh potensi anaknya lahir dan batin. Maka dalam usaha mengoptimalkan potensi tersebut, anak hendaknya diberikan pertolongan yang mencakup pertolongan dalam hal perawatan fisik, dan pertolongan dalam hal pembentukan rohani. Perawatan dalam bentuk fisik dapat dilakukan dengan memberinya makanan bergizi, memeriksa kesehatan, menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Sementara dilihat dari perawatan rohani, hal terpenting adalah pendidikan yang dapat meningkatkan seluruh potensi seorang anak yang diberikan oleh Allah (Daulay, 2014). Selain itu, sejak kecil seorang anak juga perlu diberikan contoh yang baik, karena mereka mempunyai rasa imitatif yang tinggi, ini merupakan karakteristik dan bagian dari proses perkembangan anak. Memberikan contoh yang baik bagian dari kewajiban orang tua seperti menunjukkan kepada mereka bahwa kita sangat menghargai orang lain, bertutur kata yang baik, bersemangat dalam bekerja, gemar membaca, berolah raga, dan lain sebagainya (Erlinda & Mulyadi, 2017).

Secara Psikologis anak membutuhkan tokoh teladan yang dapat ditirunya, maka di sinilah letak hubungan dan keterkaitan antara keteladanan dengan pembiasaan. Maka, orang tua harus selalu berusaha melakukan hal baik dalam segi ucapan maupun perbuatan agar menjadi suri teladan yang baik bagi anaknya, bukan malah memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka (A. B. P. Us'an, 2024). Para guru di lingkungan sekolah juga mempunyai kewajiban membentuk

karakter. Tugas pokoknya bukan saja mengajar, namun mendidik dan membimbing agar menjadi manusia yang melaksanakan tugas kehidupannya yang selaras dengan kodratnya, baik hubungannya dengan sesama dan Tuhannya (Us'a, Jenjang Waldiono, 2025). Guru harus memberikan teladan yang dapat ditiru oleh siswa, maka seyogyanya guru harus menjadi contoh yang baik. Misalnya dengan mentaati peraturan sekolah, dengan datang tepat waktu, ikut serta dalam menjaga lingkungan sekolah, dan sebagainya (Nella Agustin, dkk 2021). Dikarenakan tanggung jawab sebagai pendidik, minimal syarat seorang guru adalah mempunyai perasaan terpenggil bahwa mendidik sebagai tugas suci, mencintai dan menyayangi muridnya, dan mempunyai tanggung jawab tinggi yang dilandasi dengan penuh akan tugasnya (Siswoyo et al, 2011). Menurut Abdullah Nasih Ulwun seorang pendidik harus mempunyai katagori dalam hal takwa, ikhlas, berilmu, santun, dan tanggung jawab (Iqbal, 2015)

Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang yang tidak memiliki ikatan famili dengan anak, namun berada di lingkungan sang anak serta melihat tingkah laku si anak. Orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak, atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, salah satunya adalah masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, dan Peran serta dalam pengambilan keputusan (Subianto, 2013). Pendidikan di masyarakat merupakan keharusan, terutama memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus serta praktis, yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan terhadap pendidikan di masyarakat beraneka ragam corak dan bentuknya. Menurut Philip H. Coombs, bentuk pendidikan di masyarakat berlangsung mulai dari penitipan bayi dan penitipan anak sebelum sekolah, pemberantasan buta huruf, kepramukaan, kursus-kursus keterampilan di bidang pertanian dan pertukangan serta yang memenuhi kebutuhan hidup dan berlangsung di luar struktur pendidikan di lingkungan sekolah (Sadulloh, 2015). Kebijakan pemerintah juga sangat dibutuhkan mengupayakan kurikulum yang berorientasi pada pendidikan karakter. Fungsi kurikulum adalah mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional (Us'an Usa'n, Muzayyim Luthfie, 2025). Pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris untuk mengkaji partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam pembentukan karakter anak secara langsung di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian kepustakaan memiliki ciri utama berupa penguraian konsep secara sistematis, dilanjutkan dengan pemberian pemahaman dan penjelasan analitis terhadap data yang menjadi objek deskripsi (Wantini, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika, yaitu metode penafsiran teks yang bertujuan untuk memahami makna, konteks, dan relevansi konsep-konsep pembelajaran secara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa referensi yang secara langsung membahas objek permasalahan penelitian, yaitu peran serta masyarakat dan pemerintah dalam membentuk karakter anak. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai sumber pendukung berupa buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, serta dokumen akademik lainnya yang relevan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Karakter Anak

Selain orang tua dan lingkungan sekolah, masyarakat juga bertanggung jawab dalam pembentukan karakter bagi anak-anak. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat. Disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat sebagai bagian dari sebuah sistem pendidikan harus memperhatikan kondisi anak-anak di sekitarnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan membentuk karakter anak adalah dengan membuat program yang disebut Kampung Ramah Anak (KRA). Kampung/Kota layak anak merupakan kampung yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kegiatan pengintegrasian harus terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Perdana, 2019). Peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan seperti memberikan penyuluhan, bakti sosial, dan lain-lain. Masyarakat juga sebagai pusat pendidikan yang turut andil dalam kegiatan belajar mengajar, seperti membantu sekolah atau lembaga bidang studi tertentu. Dalam hal ini masyarakat bisa membuat lokasi bermain dan belajar.

Misalnya menyelenggarakan program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Di sini anak-anak dapat mengakses pembelajaran, tidak hanya baca tulis Al-Qur'an melainkan ilmu-ilmu yang lainnya. Mereka diberikan materi hafalan dan pemahaman, serta berbagai keterampilan yang bisa mereka kembangkan untuk menumbuhkan kompetensi mereka (Us'an Us'an, Dandy Yusuf Alfasyah, 2026). Masyarakat pun memiliki peran sebagai pengontrol tingkah laku anak-anak. Maka masyarakat inilah yang nantinya dapat memberikan teladan yang baik, mengajak atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam membentuk karakter anak: 1) Membiasakan gotong royong, misalnya: membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami pekarangan rumah. 2) Membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. 3) Menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat.

4) Tidak ada kepedulian. 5) Tidak merasa bertanggung jawab. 6) Menganggap perbuatan anak adalah hal yang sudah biasa. Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Peran serta Masyarakat dalam pendidikan memang sangat erat sekali terkait dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi apabila tidak dimulai dan dilakukan dari sekarang, kapan rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dapat terwujud (Jito Subianto, 2013). Agar anak tetap menerapkan akhlak terpuji, terdapat sumber etika yang harus ditaati bersama. Sumber etika tersebut dikenal dengan istilah norma atau aturan-aturan. Norma kerap diartikan sebagai tolak ukur untuk mengukur benar salahnya suatu sikap atau tindakan.

Norma ini telah dibuat oleh masyarakat, kemudian masyarakat menjadikan keuntungan individu dan kemaslahatan secara bersama. Norma inilah yang harus diikuti oleh masyarakat dan norma tersebut merupakan aturan yang ditularkan oleh generasi tua kepada generasi berikutnya (Rohimah, Atqiyya, Yasmin, 2021). Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu: 1) Norma Agama yaitu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah agama. Norma agama bersifat mutlak dan mengha-ruskan ketaatan bagi para penganutnya, 2) Norma Kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani manusia. Norma kesusilaan bersifat universal, artinya setiap orang memilikinya, hanya bentuk dan perwujudannya yang berbeda. Misalnya perilaku yang melanggar nilai kesusilaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan, 3) Norma Kebiasaan yaitu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak menjalankan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya, 4) Norma kesopanan yaitu norma yang berpangkal pada atauran tingkah laku yang ada di dalam masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, dan cara Norma Kebiasaan berbicara. Norma ini bersifat relatif dalam arti penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu, 5) Norma Hukum yaitu himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat (negara). Masyarakat yang melanggar norma ini diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yaitu negara. Tujuannya menciptakan suasana aman dan tenteram dalam masyarakat. Sebagai implementasi berperilaku kepada sesama manusia, hendaknya norma-norma di atas disosialisasikan bahkan diajarkan kepada anak-anak kemudian ditaati dan dijalankan secara bersama sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi Kebijakan Pemerintah Berorientasi Pada Pembentukan Karakter

Upaya penanaman pendidikan karakter di masyarakat juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah, maka seyogyanya yang harus dilakukan pemerintah adalah: 1) Menciptakan iklim kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang kondusif dan stabil yang dapat memberdayakan kehidupan warga masyarakat sejahtera, 2) Menciptakan iklim kehidupan beragama yang kondusif bagi masing-masing pemeluknya, 3) Mengembangkan sikap saling menghormati, dan toleransi antar umat beragama, suka, dan ras, 4) Menghilangkan atau memberantas berbagai faktor yang memicu merebaknya dekadensi moral, seperti menutup pabrik minuman keras dan hiburan malam, memberantas perjudian dan menghukum para bandarnya, menghukum mati para pengedar dan pengguna narkoba, menghukum seberat-beratnya para produser dan pengedar film majalah porno, menghentikan tayangan-tayangan televisi yang merusak moral atau keyakinan beragama masyarakat, menghukum seberat-beratnya kepada para koruptor atau penjahat yang merampas hak rakyat, dan sebagainya, 5) Para pemimpin atau pengajar memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai moral seperti: hidup sederhana, jujur, amanah, atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sederhana, tidak memamerkan harta kekayaan, 6) Di bangunnya hutan kota, taman-taman, atau tempat rekreasi halal yang nyaman sebagai tempat untuk berolah raga ringan, wisata keluarga, tempat Pelepas Lelah dan tempat memperoleh udara atau oksigen yang sehat (Yusuf, 2018).

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Deklarasi Dunia yang Layak untuk Anak (*world fit for children*). Hak anak yang perlu diperhatikan dan dijamin pemerintah sebagaimana tersebut dalam Konvensi tersebut antara lain hak untuk tempat tinggal, hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memperoleh transportasi umum (Jazariyah, 2016). Pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara regular. Menurut Sihombing ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat yaitu:

Tabel 1. Tugas dan fungsi pemerintah

No	Tugas Pemerintah	Penjabaran
1	Sebagai Pelayan Masyarakat	Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama
2	Sebagai Fasilitator	pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani

3	Sebagai Pendamping	pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping
4	Sebagai Mitra	apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama
5	Sebagai Penyandang Dana	pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mengubah kurikulum yang berorientasi kepada pendidikan karakter perlu didukung dan dilaksanakan secara bersama, misalnya saja Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diubah menjadi kurikulum 2013 (K-13) (Marlina, 2013). Kemudian kurikulum K13 menjadi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Perubahan kurikulum pada satuan pendidikan mempunyai dasar yang kuat dan tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terus berubah. Sama halnya sekarang ini, digitalisasi menjadi salah satu tolak ukur kemunculan kurikulum merdeka belajar. Merdeka Belajar ini, kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dicanangkan Nadiem Anwar Makarim. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2019 lalu menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia berada diposisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Mendikbud pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter (Uswatiah & Masruroh, 2021). Kurikulum merdeka belajar salah satu konsep kurikulum yang menuntut kemandirian peserta didik. Kemandirian dalam arti bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (Manalu, Juliati Boang, Fernando Sitohang, 2022). Pada tahun mendatang, sistem pembelajaran akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas.

Pembelajaran akan lebih nyaman, karena siswa dapat berdiskusi lebih dengan guru, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat (Hasim, 2020). Atas dasar itu, pendidikan karakter mutlak menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku pendidikan mulai dari orang tua, guru, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dengan digalaknya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan, diharapkan dapat mencegah dampak negatif globalisasi dan westernisasi dalam hal penyimpangan perilaku terhadap moral bangsa serta dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter yang tercermin dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat, warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif (Us'an, Sriyono, Miftah Khilmi Hidayatulloh, 2026). Dalam Renstra Depdiknas pada tahun 2005-2009 dikatakan pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia seutuhnya, berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan tersebut mencakup tiga hal yaitu: (1) Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur, (2) Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektual untuk menggali, mengem-bangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetik (S. Us'an, 2022). Sejalan dengan visi tersebut, Indonesia berhasrat untuk mengembangkan insan yang cerdas kompetitif, dan cerdas komprehensif yang ditabulasikan berikut ini (Zubaidi, 2012):

Tabel 2. Insan Cerdas Komprehensif dan kompetitif

No	Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif	Makna Insan Indonesia Cerdas Kompetitif
1	Cerdas Spiritual Beraktualisasi melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian unggul	• Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Mandiri • Pantang menyerah • Pembangunan dan pembinaan jejaring • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi agen perubahan • Produktif • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajar sepanjang hayat
2	Cerdas Emosional Beraktualiasai melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya serta kompetensi untuk mengekspresikannya	
3	Cerdas Sosial Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang meliputi: • Membina dan memupuk hubungan timbal balik • Demokratis • Empatik dan simpatik • Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia	

	• Ceria dan percaya diri • Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat serta bernegara • Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara
4	Cerdas Intelektual • Beraktualisasai diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, dan imajinatif
5	Cerdas Kinestetik • Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, dan terampil • Aktualisasi insan adiraga

KESIMPULAN

Pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam pembentukan kualitas anak sebagai individu dan sebagai warga negara. Berdasarkan kajian kepustakaan ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter anak tidak dapat berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah memiliki peran strategis yang saling melengkapi untuk membentuk karakter. Orang tua berperan sebagai pendidik primer melalui keteladanan dan pembiasaan nilai-nilai moral sejak dini, guru sebagai pendidik profesional menanamkan karakter melalui proses pembelajaran dan keteladanan di sekolah, sementara masyarakat menjadi lingkungan sosial yang turut membentuk karakter anak melalui norma, budaya, dan kontrol sosial yang berlaku. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pembentukan karakter anak selain orang tua dan guru. Di sisi lain, kebijakan pemerintah memiliki posisi sentral sebagai pengarah dan penopang sistem pendidikan karakter melalui regulasi, kurikulum, fasilitasi, pendanaan, serta penciptaan iklim sosial yang kondusif. Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, hanya akan efektif apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pendidikan karakter menjadi kunci dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan kompetitif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam tulisan sederhana ini, penulis menyadari bahkan tulisan ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta arahan dari dosen pembimbing. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi terutama kepada Dr. Arif Rahman yang mengarahkan dalam penulisan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, H. P. (2014). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat* (1st ed.). Kencana.
- Erlinda, & Mulyadi, S. (2017). *Melindungi dan Mendidik Anak Dengan Cinta*. Erlangga.
- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar,"* 69–70.
- Iqbal, A. M. (2015). *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim*. Pustaka Pelajar.
- Jazariyah. (2016). Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini. *GOLDEN AGE: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Volume. 1*, 28–29.
- Jito Subianto. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 8, No.* 342.
- Manalu, Juliati Boang, Fernando Sitohang, N. H. H. T. (2022). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar. *PROSIDING PENDIDIKAN DASAR, Volume 1* |, 81. <https://doi.org/DOI.10.34007/ppd.v1i1.174>
- Marlina, M. E. (2013). Kurikulum 2013 Yang Berkarakter. *JUPIIS, Vol.5 No.2*, 28.
- Nella Agustin, D. (2014). *Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa*. UAD Press.
- Perdana, F. R. (2019). Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, Vol. 3, no.* 163. <https://doi.org/doi:10.14421/jpm.2019.031-08>

- KEPEMIMPINAN ISLAM. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*, Volume 7, 11–12.
- Sadulloh, U. (2015). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Alfabeta.
- Siswoyo, D., & Dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan*. UNY Press.
- Us'a, Jenjang Waldiono, M. (2025). Model Pendidikan Agama Bagi Anak Sesuai Tahap Perkembangannya: Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi Islam. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, Vol. 6 No., 182–194. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37216/aura.v6i2.2965>
- Us'an, Sriyono, Miftah Khilmi Hidayatulloh, W. (2026). Penyimpangan Kaum Nabi Luth dalam Konteks Sosial Masyarakat dan Mekanisme Kontrol Diri Perspektif Neuropsikologi Melalui Bimbingan Islami. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4Nu, 3040. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3604>
- Us'an, A. B. P. (2024). Nilai-Nilai Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Neurosains dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di SD Negeri Serayu. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 8, No, 75–92. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v8i1.9869>
- Us'an, S. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR: UPAYA PENDIDIK MEMBENTUK KARAKTER SISWA DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045 BERBASIS NEUROSAINS. *MUALLIMUNA: JURNAL MADRASAH IBTIDAIYAH*, Vol. 7, No, 84. <https://doi.org/DOI:10.31602/muallimuna.v7i2.6379>
- Us'an Us'an, Dandy Yusuf Alfasyah, F. A. (2026). Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pencegahan Anak Berurusan Hukum: Pendekatan Edukatif dan Preventif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, 243–251. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.18193551>
- Us'an Us'an, Katni Katni, Ustadi Hamzah, A. Q. M. (2026). Kiprah Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045 dan Pendidikan Karakter Sejak Dini Melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4Nu, 3640. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3694>
- Us'an Usa'n, Muzayyim Luthfie, S. (2025). Internalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Neurosains. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 2, No, 211–219. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.63822/0yt4xn86>
- Uswatiyah, W., & Masruroh. (2021). Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Volume 3 N, 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/jdi.v3i1.299>
- Wantini, U. (2023). Implikasi Konten Pornografi pada Anak: Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini dalam Usaha Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9 No., 253. <https://doi.org/https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/JPA/article/view/582>
- Yusuf, S. (2018). *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologis dan Agama*. PT Remaja Rosdakarya.
- Zubaidi. (2012). *Isu-isu Baru dalam Diskursus: Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.